

## **BAB II**

### **Dinamika Hubungan Tiongkok dan Jepang**

Hubungan Tiongkok dan Jepang telah berlangsung sangat lama bahkan jauh sebelum perang dunia II. Dalam bab ini penulis akan membagi pembahasan mengenai dinamika hubungan Tiongkok dan Jepang pasca sebelum Perang Dunia II dan dinamika hubungan Tiongkok dan Jepang pasca perang dunia II. Secara umum jika membicarakan dinamika hubungan Tiongkok dan Jepang maka akan didominasi oleh isu perdagangan, perebutan wilayah, perebutan pengaruh, perebutan wilayah, atau perluasan kekuasaan. Tetapi, membicarakan dinamika hubungan Jepang dan Tiongkok sebelum periode Perang Dunia II maka akan memfokuskan tindakan-tindakan atau agresi yang dilakukan Jepang pada Tiongkok dimana agresi tersebut diawali perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada periode tersebut, hubungan kedua negara dimulai oleh isu perdagangan sampai dengan isu militer. Setelah berakhirnya Perang Dunia II terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pola hubungan antara Tiongkok dan Jepang. Semula, sebelum Perang Dunia II Tiongkok merupakan negara yang menjadi korban imperialisme Jepang namun berbeda ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II memaksa Jepang untuk melepas tameng kejayaan militer yang melekat padanya selama ini. Hingga pada akhirnya membuatnya berubah menjadi negara dengan militer yang pasif. Jepang pada periode itu terpaksa tidak lagi bisa mengandalkan kehebatan militernya dan banyak memulai dan menjalin hubungan yang damai dengan negara-negara luar.

Maka, periode pasca Perang Dunia II terjadilah pergeseran pola hubungan antara Jepang dan Tiongkok yang semula dari isu militer menjadi isu ekonomi.

#### **A. Hubungan Tiongkok Dan Jepang Sebelum Perang Dunia II**

Jepang dan Tiongkok adalah dua negara dikawasan Asia Timur yang berbatasan secara geografis. Kedua negara ini dipisahkan oleh Laut Tiongkok Timur. Selain memiliki kedekatan secara geografis kedua negara juga memiliki keterikatan secara historis. Bahkan sejarah mencatat kedua negara memiliki sejarah hubungan yang panjang. Hubungan kedua negara telah berlangsung bahkan jauh sebelum perang dunia II, namun kompleksitas hubungan kedua negara banyak terjadi pada period-period menjelang perang dunia II.

Sebagai negara yang memiliki kedekatan secara geografis, Tiongkok dan Jepang memulai hubungan melalui jalur perdagangan. Kedua negara telah menjalin hubungan perdagangan yang damai yaitu melalui Shanghai dan Nagasaki. Hubungan perdagangan ini terjalin ketika Jepang masih berada dibawah pemerintahan Tokugawa. Selam kurang lebih 250 tahun, Tokugawa menjalankan politik isolasi atau politik menutup diri yang sangat membatasi pergerakan dan interaksi antara Jepang dengan bangsa luar. Oleh karenanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri Tiongkoklah yang menjadi satu dari dua negara yang diperbolehkan berinteraksi dengan Jepang melalui hubungan perdagangan. Meskipun memiliki hubungan perdagangan yang erat, kedua negara ini pada waktu itu tidak memiliki hubungan diplomatik secara formal ataupun resmi.

Ketika Jepang mengalami perubahan kekuasaan yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Tokugawa dan diambil alih oleh Tenno Haika atau Meiji

Tenno terjadi pula perubahan pola hubungan antara Jepang dan Tiongkok. Pada masa Tokugawa Jepang dianggap sangat jauh tertinggal dari bangsa luar dikarenakan politik isolasi yang dijelankannya lalu ketika Jepang beralih kekuasaan dan dipimpin oleh Tenno Haika, Jepang mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Tenno Haika atau Meiji Tenno membawa pembaharuan bagi bangsa Jepang mealalui berbagai kebijakan dan ide-idenya yang kemudian dikenal dengan restorasi Meiji.

Paska revolusi meiji pada tahun 1868 ini, terjadi berbagai perubahan pandangan Jepang yang lebih menyerupai pemerintahan model barat. Adanya revolusi meiji Jepang memiliki tujuan baru yaitu yaitu mempunyai ambisi untuk mensejajarkan dirinya dengan negara-negara barat. Inilah kemudahan yang menandai perubahan pola hubungan anantara Jepang dan Tiongkok yang semula kedua negara ini melakukan hubungan yang damai melalui jalur perdagangan kemudian berubah menjadi hubungan atau interaksi yang diwarnai dengan ketegangan. Meskipun tahun 1868 adalah periode yang sudah sangat lama tapi inilah yang menjadi momentum untuk menceritakan hubungan Jepang dan Tiongkok. Perubahan berupa “modernisasi” Jepang inilah yang kemudian menjadi titik awal dari fluktusi hubungan antara Jepang dan Tiongkok.

Semangat revolusi meiji ini membuat Jepang berambisi untuk mengejar ketertinggalan. Jepang belajar dan berkaca pada negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Spanyol, Portugis dan Belanda yang melakukan perluasan wilayahnya dengan melakukan penjajahan hampir di seluruh benua. Kenyataan itu membuat Jepang merasa perlu untuk mengikuti jejak yang sama menguasai

negara-negara di daratan Asia. Berbekal kepercayaan diri yang ditopang oleh kekuatan dan keunggulan militernya, Jepang terdorong untuk memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke luar wilayahnya. Jepangpun mengambil langkah dengan memulai melakukan intervensi terhadap negara-negara tetangganya di kawasan. Korea adalah negara peratama yang menjadi tempat Jepang melakukan perluasan wilayahnya. Ketika itu, Korea masih berada di bawah pengaruh Tiongkok. Upaya Jepang untuk mengambil alih paksa wilayah Korea menyulut kemarahan Tiongkok. Akibatnya, Tiongkok dan Jepang kemudian terlibat perang besar sekitar tahun 1894-1895 yang kemudian dikenal dengan Perang Tiongkok-Jepang Pertama. Perang ini berakhir dengan penandatanganan perjanjian Shimonoseki.<sup>14</sup> Akibat dari kekalahan dalam perang ini, Tiongkok mendera beberapa kerugian. Tiongkok diharuskan menanggung kerugian finansial yang dialaminya serta diharuskan membayar kerugian yang diderita oleh Jepang dan beberapa konsekuensi kekalahan perang lainnya.

Tidak berhenti sampai disitu saja, persetujuan antara Tiongkok dan Jepang atas perebutan pengaruh dan wilayah terus berlanjut. Jepang melanjutkan ekspansinya dengan menganut paham *Hakko I Chi U* dan pernyataan dari Perdana Menteri Jepang pada tahun 1927 Tian Zhong Yi, yang mengatakan bahwa:

*“In order to conquer the whole world, we must conquer Cina first. It is obvious that, due to limination of its natural resources. Japan always tries aggressively to expand in order to rob resources from other countries.”*

---

<sup>14</sup> The First Sino- Japan War. Diakses melalui <https://www.thoughtco.com/first-sino-japanese-war-1894-95-195784> diakses pada tanggal 28 Januari 2017

oleh karena itulah, kisaran tahun 1937 sampai 1945 kembali meletus sebuah perang besar antara Tiongkok dan Jepang sebelum pecahnya Perang Dunia II.<sup>15</sup> Perang ini dikenal dengan perang Tiongkok-Jepang kedua. Perang Tiongkok-Jepang kedua ini dipicu oleh adanya kebijakan imperilalisme yang diterapkan oleh Jepang selama beberapa dekade. Jepang berkeinginan untuk mendominasi dirinya atas Tiongkok baik secara politisi maupun militer untuk mengambil alih cadangan bahan baku sumber daya alam melimpah yang dimiliki Tiongkok.

Pada 1945, meletuslah Perang Dunia II sekaligus menandai berakhirnya Perang Tiongkok- Jepang serta membawa kedua negara ini bergabung dalam konflik yang lebih besar.

Melihat fakta di atas, hubungan Tiongkok dan Jepang memang telah terjalin sangat lama. Jauh sebelum periode Perang Dunia II yaitu tahun 1868 telah terjadi konflik besar yang melibatkan kedua negara. Meskipun Jepang dan Tiongkok hubungan perdagangan yang dilakukan dengan jalan damai dinamika hubungan kedua negara secara garis besar banyak diwarnai konflik dan ketegangan. Pasang surut hubungan kedua negara sebelum periode perang dunia II banyak melibatkan isu militer.

## **B. Hubungan Jepang Dan Tiongkok Pasca Perang Dunia II**

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ditandai dengan jatuhnya Bom atom di dua kota Utama di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara Amerika. Kondisi negara Jepang ketika itu hancur dan luluh lantah. Pasca kekalahan dalam

---

<sup>15</sup> Bix, Herbert P. *The Showa Emperor's "Monologue" and the Problem of War Responsibility*, *Journal of Japanese Studies*, Vol. 18, No. 2. (Summer, 1992), hlm. 295-363.

Perang Dunia II, Jepang berusaha bangkit kembali membangun negaranya dengan berfokus membangun perekonomian serta beberapa bidang lainnya. Jepang mulai memperbaiki sistem pemerintahan serta politik luar negerinya hingga sesuai dengan kepribadian bangsa dan memprioritaskan hubungan harmonis antar bangsa.

Politik luar negeri Jepang setelah Perang Dunia II sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelum Perang Dunia II secara tegas mengejar kepentingan-kepentingan nasionalnya dengan menunjukkan politik luar negeri yang berdiri sendiri. Sedangkan setelah Perang Dunia II, sebagai negara yang kalah perang, Jepang harus menyesuaikan diri dengan negara yang mengalahkannya khususnya Amerika Serikat. Amerika Serikat memegang peranan utama di Jepang setelah selesai perang yaitu berupa pendudukan atas wilayahnya. Era pendudukan AS terjadi kurang lebih 7 tahun mulai dari tahun 1945 sampai tahun 1952. AS menerapkan beberapa kebijakan selama masa pendudukannya antara lain<sup>16</sup> :

- 1) Menghancurkan militer yang menjadi penyebab perang
- 2) Mengadili penjahat-penjahat perang
- 3) Membersihkan para pemimpin yang terbukti bertanggung jawab atas politik agresi
- 4) Pembayaran ganti rugi perang
- 5) Penghancuran industri perang dan perampasan alat-alat perang
- 6) Pendemokrasian politik, ekonomi, dan pendidikan.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, dkk. 2015. *Kebangkitan Jepang Pasca Pendudukan Amerika Serikat Tahun 1952-1964*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember. Jember, hlm 2.

Kebijakan yang diterapkan AS ini berimplikasi pada kondisi internal Jepang. Akibatnya muncul permasalahan dalam berbagai bidang. Masa pendudukan AS di Jepang berakhir dengan adanya perjanjian *San Francisco* pada tahun 1951 yang disepakati oleh 56 negara. Perjanjian Damai *San Francisco* ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 1952.

Pasca ditandatanganinya perjanjian *San Francisco*, Yoshida Shigeru sebagai Perdana Menteri Jepang pada saat itu melakukan upaya-upaya pemulihan kondisi Jepang pasca kealahannya dalam perang dunia II yang menitik beratkan pada pemulihan ekonomi dan politik. Pembaruan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Yoshida mencangkup orientasi pembangunan dibidang ekonomi dan pertahanan dalam taraf minimum.

Dimasa pendudukan Amerika inilah Jepang kembali meleparkan pandangan sinis pada negara tetangganya, Tiongkok. Jepang merasa sakit hati oleh sikap AS terhadap RRT ketika Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Presiden Nixon, menetapkan kunjungan ke Peking tanpa terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Jepang sebagai sekutu dekatnya dan negara yang patuh padanya selama ini. Jepang menduga bahwa AS akan menjadikan Tiongkok sebagai partner ekonomi yang penting. Sejarah mencatat Jepang dan Tiongkok menorehkan sejarah kelam, yang samapi saat ini masih membekas di benak masyarakat kedua negara.

Pada tahun 1972, Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka melakukan kunjungan ke Tiongkok dan menstabilkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Meskipun kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Tiongkok ini

disambut dengan demonstrasi di seluruh Tiongkok tapi paska kunjungan Perdana Menteri ini hubungan kedua negara mulai membaik.

**a. Hubungan Tiongkok- Jepang dalam Bidang Ekonomi dan Politik**

Banyak hal yang mendesak Jepang agar segera berhubungan erat dengan Tiongkok. Jepang sangat membutuhkan Tiongkok untuk mengamankan suplai energi. Selain minyak, Tiongkok dapat menjual batubara. Pada dasarnya Jepang sebenarnya paling mengenal Tiongkok daripada dari pada bangsa asing lain. Hubungan kedua negara terjalin lebih dari 2000 tahun yang membentuk hubungan kebudayaan yang amat erat. Jadi wajar jika Jepang sangat mengharapkan untuk dekat dengan Tiongkok.

Dari sudut ekonomi, Jepang melihat Tiongkok sebagai tempat paling memungkinkan untuk pemasaran hasil produknya. Maka politik Luar Negeri Jepang terhadap RRT semakin intensif. Usaha-usaha Jepang semakin ditunjang oleh perubahan-perubahan yang terjadi di RRT. Sejak Tiongkok didominasi oleh orang-orang yang dekat dengan Deng Xiaoping, maka politiknya menjadi berlainan dengan periode sebelumnya, khususnya dengan Revolusi Kebudayaan. Deng Xiaoping, telah dapat membawa RRT untuk melangkah menjalankan Program Modernisasi yang meliputi bidang pertanian, industry, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan. Dalam menjalankan Program Modernisasi itu Tiongkok lebih mendekatkan diri kepada negara-negara yang berorientasi pasar. Dengan melakukan hal ini Tiongkok dapat mengharapkan sumber-sumber untuk melancarkan upaya modernisasinya. Oleh karena itu, Tiongkok menjadi negara komunis yang banyak melakukan hubungan dengan AS,



Jepang dan negara-negara Eropa Barat. Tiongkok mendapat bantuan kredit dari negara-negara tersebut untuk membangun industrinya serta memperoleh teknologi dan pengetahuan lain untuk memajukan masyarakatnya.

Perkembangan RRT ini sangat menguntungkan Jepang. Dengan perubahan sikap Tiongkok tersebut, Jepang memanfaatkan situasi ini dengan menjalin hubungan terbuka dengan Tiongkok, khususnya dalam bidang ekonomi. Jepang memandang negara tersebut sebagai pasar yang potensial bagi pemasaran produknya. Seperti yang telah disebutkan di atas, Jepang dan Tiongkok telah menjalin hubungan perdagangan dan ekonomi sudah sangat lama dan meskipun keduanya tetap menjalin kerjasama tersebut namun pasca perang dunia II terutama untuk membenahi kehancuran negaranya akibat perang, Jepang sangat berfokus dalam membangun perekonomiannya kembali.

Dalam melancarkan upayanya tersebut, pemerintah Jepang memberikan respon positif atas Jepang juga memberikan dukungan bagi Tiongkok melalui kucuran dana dalam membantu melancarkan reformasi ekonomi di negara tetangganya tersebut. Bantuan ekonomi yang diberikan Jepang pada Tiongkok salah satunya adalah dengan menggunakan bantuan ODA (*Official Development Assistance*). Diantara negara-negara DAC (*Development Assistance Committee*) seperti Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Australia, Jepang merupakan pendonor terbesar bagi Tiongkok selama periode 1991-1995.<sup>17</sup> Kemudian Pada tahun 1994-

---

<sup>17</sup> Lim Hua Ling.2001."Peranan Jepang di Asia" PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: hal 271. dalam Muhammad Yayin. 2008. *Tingkat Ekonomi Jepang-Cina dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Politik Kedua Negara*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1996 Tiongkok menjadi penerima ODA terbesar Jepang yang mencapai USD 3,7 miliar, mengalahkan negara-negara penerima ODA Jepang lainnya.<sup>18</sup>

**Tabel 1**  
**Bantuan Ekonomi Oda Jepang Kepada Tiongkok**

(US \$ Juta)

Tahun	Hibah			Bantuan Pinjaman		
	Bantuan Hibah	Kerjasama Tekhnis	Total	Bruto	Netto	Total
1992	72.05	187.48	259.53	871.27	791.23	1.050.76
1993	54.43	245.06	299.49	1.189.06	1.051.19	1.305.68
1994	99.42	246.91	346.33	1.298.48	1.113.08	1.479.41
1995	83.12	304.75	387.87	1.216.08	992.28	1.380.15
1996	24.99	303.73	328.72	774.08	553.01	861.73
Total (1992-96)	334.01	1.287.93	1.621.94	5.348.95	4.500.79	6.112.73

Sumber: Kementerian Luar Negeri, Laporan Tahunan ODA Jepang (Lim Hua Ling, 2001. "Peranan Jepang di Asia" PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: hal 272. dalam Muhammad Yayin. 2008. *Tingkat Ekonomi Jepang-Cina dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Politik Kedua Negara*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>18</sup> *Ibid.* Lim Hua Ling. Hal 269. dalam Muhammad Yayin

**Table 2****Distribusi Bantuan Menurut Bentuknya Kepada 10 Negara Penerima Oda Bilateral Jepang Terbesar**

(Atas dasar pembayaran netto; US\$ Juta,%)

1994						
Ranking	Negara	Besarnya	%	Uraian Bantuan Hibah	Kerjasama Tekhnis	Pinjaman
1	<b>Tiongkok</b>	1.479.41	15.28	99.42	246.91	1.133.07
2	<b>India</b>	886.53	9.16	34.64	23.61	828.28
3	<b>Indonesia</b>	886.17	9.15	72.28	117.69	636.20
4	<b>Filiphina</b>	591.60	6.11	138.41	110.41	342.78
5	<b>Thailand</b>	382.55	3.95	27.36	137.36	217.84
6	<b>Syiria</b>	330.03	3.41	16.53	8.57	304.93
7	<b>Pakistan</b>	271.04	2.80	50.72	19.44	200.88
8	<b>Bangladesh</b>	227.60	2.35	204.71	35.93	-13.05
9	<b>Srilangka</b>	213.75	2.21	53.59	27.51	132.66
10	<b>Mesir</b>	118.99	1.95	129.51	20.85	38.63
Total 10 Negara		5.457.67	56.37	827.17	808.28	3.822.22
Total Seluruh Dunia		9680.48	100.0	2.402.90	3.020.31	4.257.27

Sumber: *ibid.*

Jepang dengan cepat dan tangkas melihat potensi yang dimiliki Tiongkok sebagai peluang negaranya dalam memperlebar sayap ekonominya. Bantuan ODA yang diberikan Jepang selain sebagai ungkapan penyesalan atas tindakan Jepang terhadap Tiongkok dimasa lampau pada kenyataannya juga dimanfaatkan oleh Jepang sebagai ujung tombak bagi kepentingannya. Perekonomian Tiongkok yang terus tumbuh dimanfaatkan oleh Jepang untuk mencapai kepentingannya. Jalanan

kerjasama ekonomi keduanya bukanlah sebagai tolak ukur bagi keharmonisan hubungan kedua negara. Terbukti hingga saat ini kedua negara ini saling menyusul dan “bersaing” dalam bidang ekonomi. Tiongkok dan Jepang saat ini berada di tempat kedua dan ketiga terbesar didunia dan pertumbuhan ekonomi dua negara ini saling menyusul. Salah satu contohnya kecil “persaingan” pengaruh ekonomi yang dijalankan oleh kedua negara adalah ketika kedua negara ini bersaing dalam memperebutkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia pada tahun 2015 lalu.<sup>19</sup>

Sedangkan perkembangan hubungan politik antara kedua negara periode-periode setelah perang sangat tertinggal jauh. Pada Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan tahun 1978, kedua negara menyisihkan sengketa soal pulau, yaitu perebutan pulau Diayou atau Senkaku.

#### **b. Hubungan Tiongkok- Jepang dalam Pertahanan dan Keamanan**

Goresan sejarah kelam masa lalu antara Tiongkok dan Jepang masih membekas di benak masyarakat kedua negara. Meskipun waktu terus bergulir dan peradaban dunia semakin maju dan pesat hubungan Tiongkok dan Jepang tetap mengalami pasang surut, tak terkecuali hubungan dalam bidang militer ataupun pertahanan dan keamanan. Jika menengok kebelakang pasang surut hubungan pertahanan dan keamanan Jepang dan Tiongkok sudah dimulai cukup lama.

Sejarah mencatat Jepang dan Tiongkok pernah beberapa kali terlibat dalam konflik terbuka. Diantaranya adalah perang Tiongkok Jepang pertama dan kedua. Walaupun konflik besar yang melibatkan kedua negara dari pasca perang dunia

---

<sup>19</sup> Persaingan dengan Jepang Kian Sengit, China Tawarkan ini ke Pemerintah RI. Diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/08/31/185517326/Persaingan.dengan.Jepang.Kian.Sengit.China.Tawarkan.Ini.ke.Pemerintah.RI> pada tanggal 19 Februari 2017

hingga saat ini tidak pernah terjadi lagi namun pada kenyataannya hubungan kedua negara ini kerap kali mengalami ketegangan. Hubungan fluktuatif antara Tiongkok dan Jepang berawal dari sejarah masa lalu kedua negara dan berlanjut sampai saat ini. Tahun 1972 tercipta sebuah Deklarasi normalisasi hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang. Deklarasi normalisasi hubungan bilateral kedua negara tampaknya tidak memberikan efek yang signifikan dalam menciptakan hubungan baik bagi kedua negara, tercatat terjadi beberapa konflik yang melibatkan kedua negara semenjak berakhirnya perang dingin. Sumber energi yang dibutuhkan Tiongkok maupun Jepang sebagai negara industri pesat membuat kedua negara berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan internal negaranya. Tuntutan pemenuhan energi ini kemudian berujung pada bentrok rute pipa minyak di Siberia Timur pada 2004 lalu. Selanjutnya terjadi ketegangan dikarenakan manuver kapal selam nuklir Tiongkok melakukan pergerakan pada teritorial perairan yang statusnya bersengketa yaitu perairan Senkaku atau Diaoyu yang menyimpan sumber daya alam yang melimpah.

Isu perebutan wilayah dan kepemilikan atas gugusan kepulauan Diaoyu atau Senkaku inilah yang sampai saat ini masih sering menyulut api perseteruan kedua negara. Baik Tiongkok ataupun Jepang sama-sama mengklaim bahwa gugusan kepulauan yang kaya akan sumber daya alam ini merupakan bagian dari wilayah teritorial negaranya. Jepang memberikan tuduhan yang tajam pada Tiongkok yang baru mulai mempertanyakan kepemilikan atas pulau tersebut pada 1970. Menurut Jepang Tiongkok hanya menginginkan kepemilikan atas sumber daya alam yang dimiliki pulau ini berupa minyak dan gas yang baru ditemukan

pada tahun 1960-an. Akibatnya timbul rasa saling curiga jika salah satu negara baik Jepang maupun Tiongkok mendekati wilayah kepulauan yang sedang dipersengketakan ini. Meski kedua negara tidak pernah saling serang dalam menangani masalah perebutan wilayah ini namun militer kedua negara sering kali bersitegang.

Konflik atas perebutan hak milik atas Pulau Senkaku atau Diaoyu ini tak kunjung selesai hingga saat ini. Perebutan pulau yang menyimpan sumber daya potensial ini membuat kedua negara mengontrol pergerakan satu sama lain khususnya penggunaan atribut militer yang digunakan dalam menjaga dan mengontrol wilayah bersengketa ini. Oleh sebab itulah dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara masing-masing kedua negara ini sangat mengandalkan kemampuan militer yang mereka miliki.

Hubungan Tiongkok dan Jepang mulai menunjukkan ketegangan yaitu pada tahun 2001, ketika Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi mengunjungi kuil *Yashukuni Shrine*. Kuil ini merupakan tempat dan symbol yang dijadikan sebagai tempat untuk menghormati para prajurit yang meninggal ketika perang. Dari sudut pandang Tiongkok, kunjungan Perdana Menteri Junichiro Koizumi ini adalah sebagai tanda penolakan kejahatan dan kekejaman perang yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II terutama dalam kasus *Rape of Nanking*. Pada tahun 2005 hubungan kedua negara kembali memburuk pasca Jepang menerbitkan buku sejarah Jepang yang tidak mencantumkan peristiwa *Rape of Nanking*. Kemudian pada tahun 2010, Jepang menangkap kapal warga negara Tiongkok yang melaut di sekitar wilayah pulau Diaoyu atau Senkaku yang masih dipersengketakan.

Meski akhirnya Jepang membebaskan kapal dan kru kapal tersebut tapi Jepang menolak untuk meminta maaf atas kejadian tersebut.

Pada tahun 2012, terjadi berbagai gejolak mengenai perebutan pulau Diayou atau Senkaku yaitu pada tanggal 15 Agustus ditahun tersebut, Polisi Jepang yang berpatori disekitar wilayah kepulauan tersebut menangkap beberapa aktivis Tiongkok yang berlayar ke pulau tersebut. Beberapa hari setelah itu yaitu pada tanggal 19 Agustus Tiongkok yang dibuat geram atas tindakan Jepang oleh para aktivis Jepang yang mendarat di pulau tersebut tanpa permissi.

Konflik dan ketegangan yang melibatkan kedua negara di dukung oleh sistem pertahanan yang kuat dibelakangnya. Baik Tiongkok maupun Jepang memiliki sistem pertahanan yang kuat. Perkembangan militer Tiongkok pasca Perang Dingin menjadi salah satu penyumbang hubungan yang konfliktual kedua negara. Pasalnya perkembangan militer Tiongkok ini ikut mempengaruhi pengambilan kebijakan di kawasan Asia Timur.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran tentang ancaman bersama terus meningkat di kedua negara. Pada bulan Desember 2004 Jepang mengeluarkan Pedoman Program Pertahanannya yang dikhususkan pada Tiongkok dan Korea sebagai ancaman keamanan potensial. Beberapa tahun berselang, tepatnya pada tahun 2010 Jepang melakukan pembaharuan terhadap Pedoman Program Pertahanan Nasionalnya yang serupa dengan yang dirilis pada 2004, yang intinya memberikan keluwesan bagi tentara Jepang untuk menghadapi berbagai ancaman dan peningkatan ketegangan serta keamanan di pulau-pulau terpencil Jepang, yang sebagian masih dalam sengketa dengan negara lain hingga

saat ini. Jepang juga memperkuat kemampuan peluru kendalinya untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Meningkatkan jumlah penangkis Patriot 3 dari semula yang berjumlah 3 buah menjadi 6 buah. Sedangkan rudal berbasis laut akan ditingkatkan dari 4 menjadi 6. Sementara armada kapal selam akan dinaikkan dari 16 menjadi 22 lalu kekuatan angkatan udara, Jepang akan memperbaharui jet-jet tempurnya. Jepang berkeinginan besar dalam membangun kekuatan pertahanan yang dinamis dengan intelijen dan teknologi yang canggih, melalui kesiagaan, mobilitas, fleksibilitas, berkelanjutan, dan keragaman disiplin, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Pedoman Kebijakan Pertahanan Nasionalnya pada 2010.<sup>20</sup> Sementara itu, Tiongkok mengeluarkan *White Paper* pertahanan baru yang menekankan pertahanan rudal dan aktivitas militer Jepang sebagai faktor keamanan yang merumitkan di kawasan.

Puncak ketegangan kedua negara terjadi tahun 2011. Di tahun ini untuk pertama kalinya Jepang menyatakan secara terbuka dalam *White Paper*nya, membahas hubungannya dengan Tiongkok secara khusus. Menurut Jepang, Tiongkok merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat dapat membahayakan Jepang dan negara-negara di kawasan karena perkembangan militernya yang sangat pesat.

Dari tahun ke tahun terlihat bagaimana eskalasi hubungan kedua negara terjadi di awal tahun 2000-an. Ketegangan terus berlanjut serta ditambah laporan keamanan Jepang semakin memperburuk hubungan dua negara. Sebelum *White Paper* tahun 2011 yang dikecam tajam oleh Tiongkok, *White Paper* Jepang pada

---

<sup>20</sup> Arah Baru Militer Jepang. Diakses melalui <http://www.dw.com/id/arah-baru-militer-jepang/a-6353590> pada 3 Februari 2017



2008 juga telah memaparkan mengenai perkembangan perdagangan Tiongkok yang sangat pesat, konflik dengan Tibet yang meruncing dan menimbulkan protes Internasional, dan tudingan Jepang terhadap Tiongkok dalam mengembangkan kemampuan militer salah satunya adalah dengan tujuan untuk mencegah kemerdekaan Taiwan. Pendapat Jepang terhadap Tiongkok dalam *White Paper*nya tahun 2008:

*“Nevertheless, China does not show a clear, specific future vision. From this perspective, there is concern about how China’s military strength will impact the regional situation and Japanese Security which is to be carefully analyzed.”<sup>21</sup>*

Sementara itu, pembahasan *White Paper* Jepang pada tahun 2009 sebagian besar hampir sama dengan 2008. Dua tahun berturut-turut Jepang masih menunjukkan kekhawatiran terhadap perkembangan militer Tiongkok. Hal ini memperlihatkan kekhawatiran yang mendalam yang ditujukan pada Tiongkok.

Pada tahun 2011, Jepang mengatakan dalam *white paper*nya bahwa perkembangan Tiongkok merupakan ancaman bagi Jepang. *White Paper* 2011 ini merupakan puncak bagi peningkatan ketegangan hubungan dua negara.

*“some of these ten vessels conducted exercises in the middle of the East China sea before advancing to the Pacific Ocean. At the time, a chinese shipborne helicopter conducted a proximate flight towards and Japanese destroyer Suzunami, which was monitoring the Chinese vessels. At it nearest it came at adistance of approximately 90 m horizontaly and the altitude was approximately 30 m. since it was recognized that flying in this manner posed a danger to safe navigation of the Jappanese vessel, the recognition was conveyed to the Chinese*

---

<sup>21</sup> Dikutif dari Japan’s White Paper 2011 dalam Marga Bayu Putra, 2015. *Analisis Konflik Laten Jepang-Cina*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.3, No. 1. Universitas Mulawarwan, hlm 171.

*government to inquire after the fact via diplomatic routes. Later, another Chinese shipborne.*<sup>22</sup>

Setiap tahun hubungan Tiongkok dan Jepang sangat fluktuatif, demo gerakan anti Jepang di Tiongkok, bentrok di kawasan perbatasan, sengketa klaim dan hal lain meningkatkan eskalasi ketegangan antara kedua negara selalu terjadi. Sedangkan klaim wilayah dan bentrok di kawasan perbatasan sangat sering terjadi. Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 4 Februari 2013 memanggil Duta Besar Tiongkok sebagai protes atas apa yang disebut serangan ke teritorial perairannya. Insiden ini terjadi setelah kapal Tiongkok berlayar didekat kepulauan yang disengketakan kedua negara.<sup>23</sup> Sepanjang awal tahun 2013 itu pula, baik Tiongkok maupun Jepang pernah mengirimkan pesawat militer ke daerah dekat kepulauan yang bersengketa tersebut dimana dalam sebuah kesempatan pesawat kedua negara saling membayangi meskipun tidak sampai menimbulkan bentrok.<sup>24</sup> Pada tanggal 23 Februari 2014, tiga kapal penjaga pantai milik Tiongkok dilaporkan memasuki wilayah yang dikuasai Tokyo di Laut Tiongkok Timur. Pada Juni 2016 Jepang menprotes Tiongkok atas temuan radar Tiongkok yang dipasang di kawasan eksplorasi gas di wilayah yang dipersengketakan di Laut Tiongkok Timur.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Dikutif dari Japan's White Paper 2011 dalam Marga Bayu Putra, 2015. *Analisis Konflik Laten Jepang-Cina*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.3, No. 1. Universitas Mulawarman, hlm 172.

<sup>23</sup> Soal Insiden Kapal, Tokyo Protes Beijing. Diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2013/02/05/118459376/soal-insiden-kapal-tokyo-protos-beijing> pada tanggal 5 Februari 2017

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Jepang Protes Cina yang Bangun Radar di Laut Cina Timur. Diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2016/08/07/118793901/jepang-protos-cina-yang-bangun-radar-di-laut-cina-timur> pada tanggal 5 Februari 2017.

Permasalahan meningkatnya ketegangan hubungan bilateral tidak hanya sebatas permasalahan klaim senkaku tetapi juga disebabkan oleh banyak faktor mulai dari faktor historis, Tiongkok yang tidak setuju akan proposal Jepang untuk menjadi anggota tetap PBB, dan keberatan Tiongkok terhadap *white paper* Jepang yang menyatakan peningkatan militer Tiongkok sebagai ancaman.

Melihat permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa hubungan Tiongkok dan Jepang dinamika hubungan Jepang dan Tiongkok diwarnai dengan dinamika yang terkait dengan konflik dan kerjasama ekonomi, perebutan pengaruh, perebutan wilayah, perang, persaingan, konflik dan perang. Melihat dari rentetan sejarah hubungan Tiongkok dan Jepang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Faktor yang kemudian timbul menjadi isu yang sensitif adalah isu militer dan keamanan dan ketika ada perubahan dilingkup kebijakan maka hal tersebut akan menjadi sensitif bagi hubungan kedua negara. Isu militer dan keamanan merupakan salah satu hal yang sering kali menjadi bibit atau kerikil dalam hubungan kedua negara.